



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ROHMAH TRIASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 820687

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.515.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 690.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 92.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG LF80 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N12L2AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA AT111121B01AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 78.650.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.686.150.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.686.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.